

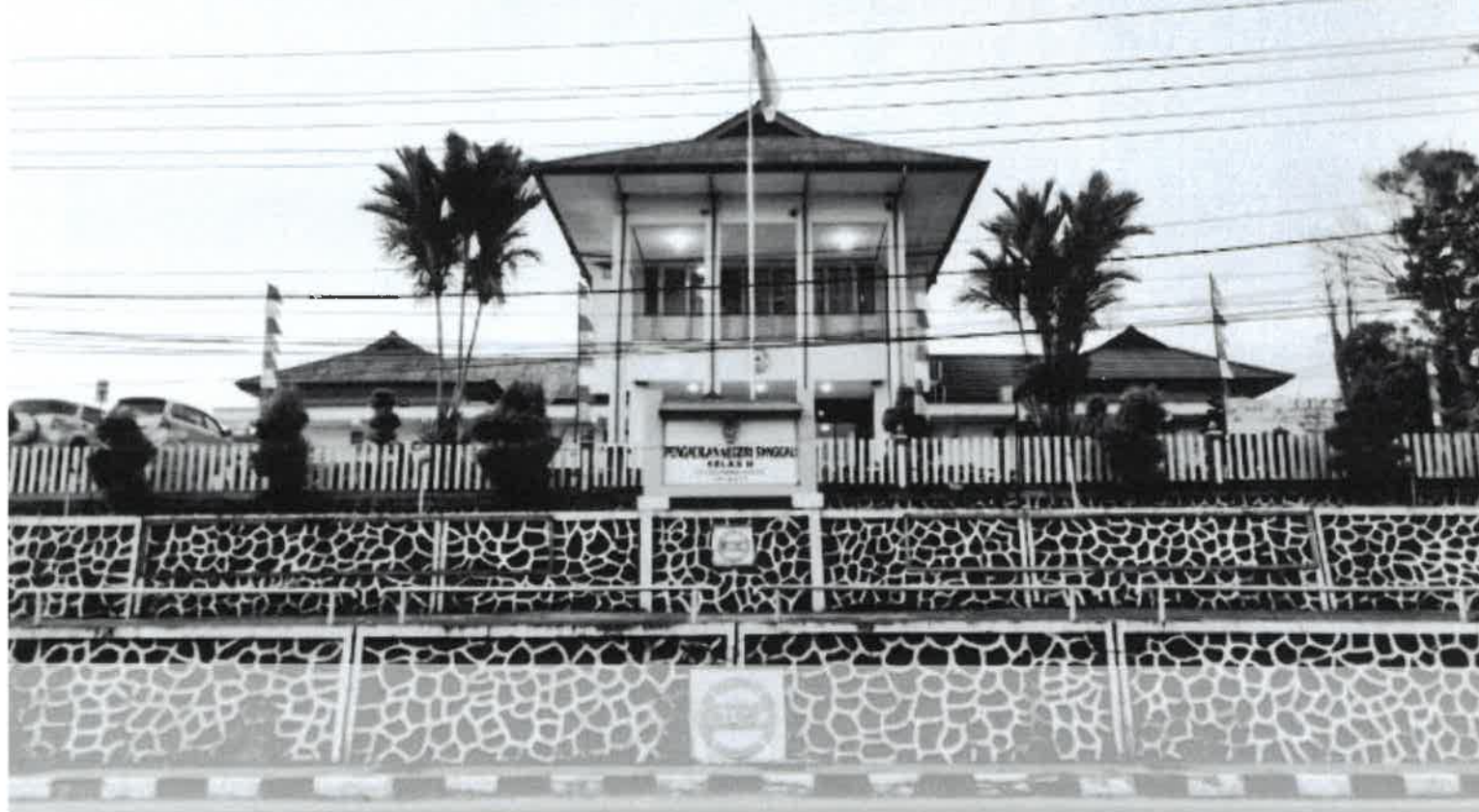


PENGADILAN  
NEGERI  
SANGGAU

TAHUN 2026

# REVISI PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI SANGGAU



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**NOMOR: 166 /KPN.RA1.10/II/2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. PONTAS EFENDI, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 6 Februari 2026

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak



Dr. PONTAS EFENDI, S.H., M.H.

NIP. 19600310 198512 1 001

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**NOMOR : 166 /KPN.RA1.10/II/2026**  
**Pengadilan Negeri Sanggau**

| No. | Sasaran Kinerja                                                                | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                   | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;                                                                                                   | 96     |
|     |                                                                                | 1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;                                       | 99     |
|     |                                                                                | 1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak; | 98     |
|     |                                                                                | 1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;            | 98     |
|     |                                                                                | 1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;                                                                                   | 99     |
|     |                                                                                | 1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;                                                                                          | 60     |
|     |                                                                                | 1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;                                                                 | 20     |
|     |                                                                                | 1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;                                                                                        | 11     |
|     |                                                                                | 1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;                                                                                   | 50     |
|     |                                                                                | 1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;                                                                                 | 99     |
|     |                                                                                | 1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);                                                                            | 99     |
|     |                                                                                | 1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);                                                                       | 99     |
| 2.  | Meningkatnya Keyakinan dan Kepercayaan Publik                                  | 2.2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;                                                              | 3,9    |
| 3.  | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional                | 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;                                                                        | 75     |
|     |                                                                                | 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01);                                                                     | 95     |
|     |                                                                                | 3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (03);                                                                     | 95     |
|     |                                                                                | 3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01);                                                                                                              | 95     |
|     |                                                                                | 3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03);                                                                                                              | 95     |
|     |                                                                                | 3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;                                                                                       | 3      |

|    | Kegiatan                                                                  | Anggaran |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp.      | 5.833.866.000 |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | Rp.      | 85.000.000    |
| 3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                      | Rp.      | 220.171.000   |

Sanggau, 6 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**NOMOR: 167 /KPN.RA1.10/II/2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERRI YANUARDI, S.H., M.H.

Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Sanggau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 6 Februari 2026

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

**Pihak Pertama**

Panitera Pengadilan Negeri Sanggau

FERRI YANUARDI, S.H., M.H.

NIP. 19850129 200805 1 001

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**NOMOR : 167 /KPN.RA1.10/II/2026**  
**Pengadilan Negeri Sanggau**

| No. | Sasaran Kinerja                                                                | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                   | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, resfonsif dan modern | 1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;                                                                                                   | 96     |
|     |                                                                                | 1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;                                       | 99     |
|     |                                                                                | 1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak; | 98     |
|     |                                                                                | 1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;            | 98     |
|     |                                                                                | 1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;                                                                                   | 99     |
|     |                                                                                | 1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;                                                                                          | 60     |
|     |                                                                                | 1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;                                                                 | 20     |
|     |                                                                                | 1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;                                                                                        | 11     |
|     |                                                                                | 1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;                                                                                   | 50     |
|     |                                                                                | 1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;                                                                                 | 99     |
|     |                                                                                | 1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);                                                                            | 99     |
|     |                                                                                | 1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);                                                                       | 99     |
| 2.  | Meningkatnya Keyakinan dan Kepercayaan Publik                                  | 2.2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;                                                              | 3,9    |
| 3.  | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional                | 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;                                                                        | 75     |
|     |                                                                                | 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01);                                                                     | 95     |
|     |                                                                                | 3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (03);                                                                     | 95     |
|     |                                                                                | 3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01);                                                                                                              | 95     |
|     |                                                                                | 3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03);                                                                                                              | 95     |
|     |                                                                                | 3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;                                                                                       | 3      |

|    | Kegiatan                                                                  | Anggaran |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp.      | 5.833.866.000 |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | Rp.      | 85.000.000    |
| 3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                      | Rp.      | 220.171.000   |

Sanggau, 6 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**NOMOR: 168/KPN.RA1.10/II/2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulkarnain, S.Kom., S.H., M.Ak.

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sanggau

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sanggau, 6 Februari 2026

**Pihak Kedua**

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

NIP. 19770106 200112 1 002

**Pihak Pertama**

Sekretaris Pengadilan Negeri Sanggau

ZULKARNAIN, S.Kom, S.H., M.Ak.

NIP. 19850730 200904 1 003

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**  
**NOMOR : 168 /KPN.RA1.10/II/2026**  
**Pengadilan Negeri Sanggau**

| No. | Sasaran Kinerja                                                                | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                                   | Target |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | 1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;                                                                                                   | 96     |
|     |                                                                                | 1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;                                       | 99     |
|     |                                                                                | 1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak; | 98     |
|     |                                                                                | 1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;            | 98     |
|     |                                                                                | 1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;                                                                                   | 99     |
|     |                                                                                | 1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;                                                                                          | 60     |
|     |                                                                                | 1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;                                                                 | 20     |
|     |                                                                                | 1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;                                                                                        | 11     |
|     |                                                                                | 1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;                                                                                   | 50     |
|     |                                                                                | 1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;                                                                                 | 99     |
|     |                                                                                | 1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);                                                                            | 99     |
|     |                                                                                | 1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);                                                                       | 99     |
| 2.  | Meningkatnya Keyakinan dan Kepercayaan Publik                                  | 2.2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;                                                              | 3,9    |
| 3.  | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional                | 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;                                                                        | 75     |
|     |                                                                                | 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (01);                                                                     | 95     |
|     |                                                                                | 3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (03);                                                                     | 95     |
|     |                                                                                | 3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (01);                                                                                                              | 95     |
|     |                                                                                | 3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (03);                                                                                                              | 95     |
|     |                                                                                | 3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;                                                                                       | 3      |

|    | Kegiatan                                                                  | Anggaran |               |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1. | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp.      | 5.833.866.000 |
| 2. | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | Rp.      | 85.000.000    |
| 3. | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                      | Rp.      | 220.171.000   |

Sanggau, 6 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H., M.H.

NIP. 19770106 200112 1 002